Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Agama Islam
Vol. xx, No .xx, Tahun. xxxx, hlm. xxx-xxx
DOI: ……
https://jurnal.stittanggamus.ac.id/index.php/al-irsyad/index

e-ISSN: xxxx-xxxx

KONSEP KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Muhammad Agung Kurniawan
UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

Email korespondensi: m.agungkurniawan21@gmail.com

Diterima: 29 April 2025. Direvisi: 08 Mei 2025. Diterbitkan: 01 Juni 2025

ABSTRACT
Education policy is important in the process of achieving national education goals so that an understanding of the basic concept of education policy is needed to produce proactive and problem-solving education policies. An important issue that needs to be highlighted is whether education policy is part of public policy. This issue is important because it is related to positioning education in the context of public sectors that must be managed seriously for the government in determining the priorities of development programs. In analyzing with a moral philosophy and political economy approach, it is concluded that education policy as public policy is not education policy part of public policy. In the preparation of policies related to education in Indonesia, education tends to be interpreted as a conscious effort to help the development of the personality and abilities of students. An education policy will later be implemented to determine the direction so that policy objectives can be realized. that "implementation" is the most important factor in a policy. Implementation of education policy is a process that is related to the behavior of the administrative body as the person in charge of implementing the program. The implementation process is also related to legal, political, economic, social factors that directly or indirectly influence the behavior of various parties involved in the program. The achievement of educational goals affects the quality of education. The quality of education can be managed based on the established educational policy. So from this it is proven that educational policies are related to each other which have an impact on the process of the education system. So in terms of educational policies, they must be formulated by paying attention to the achievement of educational goals.

Keyword: Education Policy Concept

ABSTRAK
Kebijakan pendidikan penting dalam proses pencapaian tujuan pendidikan nasional agar pemahaman tentang konsep dasar kebijakan pendidikan diperlukan untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang proaktif dan memecahan masalah. Persoalan penting yang perlu disorot adalah apakah kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik. Permasalahan tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan memosisikan pendidikan dalam konteks sektor-sektor publik yang harus dikelola secara serius bagi pemerintah dalam menetapkan prioritas program-program pembangunan. Dalam menganalisis dengan pendekatan filsafat moral dan ekonomi politik disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik bukan kebijakan pendidikan bagian dari kebijakan publik. Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan di

Indonesia ini, pendidikan cenderung diartikan sebagai usaha sadar untuk membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik. Sebuah kebijakan pendidikan nantinya akan di Implementasikan untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat teralisasi. bahwa "implementasi" merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi berkairan juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Pencapaian tujuan pendidikan berpengaruh terhadap mutu Pendidikan kualitas pendidikan tersebut dapat dikelola berdasarkan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Maka dari hal ini dibuktikan bahwa kebijakan pendidikan memiliki keterkaitan satu sama lain yang berdampak kepada proses berjalanyan sistem pendidikan tersebut. Maka dalam hal kebijakan pendidikan harus dirumuskan dengan memperhatikan ketercapaian tujuan pendidikan tersebut

Kata Kunci: Konsep Kebijakan Pendidikan

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses sosial untuk mewariskan nilai-nilai kehidupan generasi dahulu ke generasi selanjutnya, agar nilai-nilai Pendidikan tersebut tetap terpelihara dan terjaga bahkan butuh dikembangkan (Darmansyah et al., 2025a). Dengan demikian, keberadaan Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan peran pemerintah sebagai penguasa. karena kompleksitas penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat sangat beragam dan membutuhkan campur tangan pemerintah (Dewi, 2016).

Disamping itu masyarakat memiliki keterbatasan, namun pemerintah memiliki kekuasaan dan kekuatan yang bisa menjamin keberadaan dan keberlangsungan pendidikan. Tidak menutup kemungkinan apabila proses penyelenggaraan pendidikan diwarnai berbagai macam konflik dan pertentangan serta dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan yang sulit ditangani oleh masyarakat sehingga intervensi pemerintah berupa kebijakan yang diharapkan menjadi solusi terbaik(Akib, 2012; Rusdiana, 2015).

Dalam penyusunan kebijakan-kebijakan yang berkenaan dengan pendidikan di Indonesia ini, Pendidikan cenderung diartikan sebagai usaha sadar untuk membantu perkembangan kepribadian dan kemampuan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan (Yuniarti et al., 2022). Secara lebih umum, pendidikan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan pembimbingan yang diberikan dengan sengaja oleh pendidik kepada peserta didik kearah suatu tujuan tertentu (Anwar, 2017).

Harapan masyarakat pada umumnya telah bergeser dari sekadar memperoleh pendidikan dalam arti pemerataan memperoleh pendidikan kepeningkatan mutu pendidikan, karena dirasakan memperoleh pendidikan dengam mutu seadanya tidak mampu meningkatkan persaingan yang berarti, dan pada gilirannya tidak mampu meningkatkan kesejahteraan (Gunawan, 2022; Muslich, 2011). Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan pada tingkat pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif dalam sistem otonomi

pemerintahan dapat melihat mana kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, mana kebijakan yang tepat.

Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang harusnya memihak atas kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan para pengambil kebijakan. Oleh karena itu,dibutuhkan pendekatan yang professional baik pada pihak pemerintahan maupun pada pihak sekolah. Dengan adanya perhatian terhadap aspek professional ini maka kebutuhan masyarakat bisa saja terpenuhi atas kesesuaiannya antara kebutuhan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Sekolah harus bisa menunjukkan bahwa urusan pendidikan harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh, terencana, terkontrol, dan bermutu.

Kebijakan yang mengatur tentang sistem pendidikan disebut dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan sudah banyak dilahirkan yang bertujuan untuk mempermudah dan memfasilitasi penyelenggara pendidikan dan masayarakat untuk dapat mengembangkan pendidikan secara inovatif untuk mencapai tujuan pendidikan nasional(Junaid, 2016). Pencapaian tujuan pendidikan berkaitan dengan faktor-faktor yang saling berhubungan diantaranya yaitu faktor pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan , alat pendidikan dan faktor lingkungan (Dewi, 2016). Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan antar sub sistem. Sistem tidak akan berjalan apabila salah satu sub sistem bermasalah yang akan mengakibatkan tidak maksimalnya fungsi sub sistem tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

Pemerintah sebagai penyelengara pendidikan harus merumuskan kebijakan pendidikan yang bersifat pro aktif dan problem solving bsehingga permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dapat diatasi (Hambali & Yulianti, 2018). Berbicara sistem pendidikan bukanlah hal yang mudah, Sistem pendidikan merupakan sebuah sistem yang kompleks dan berhubungan antara satu dengan yang lainya. Oleh sebab itu diperlukannya pemahaman mengenai kebijakan pendidikan agar penyelenggara pendidikan mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional Indonesia.

Dengan kehadiran UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemerintahan daerah, dimana sejumlah kewenangan telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, memungkinkan daerah untuk melakukan kreasi dan inovasi dalam upaya pembangunan daerahnya, termasuk dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang pengelolaan pendidikan, khususnya bab 14 pasal 50 menjelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga pendidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Hal ini lah yang menjadi latar belakang penulisan artikel ini dengan memaparkan konsep kebijakan pendidikan. Oleh sebab itu tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji ruang lingkup kebijakan pendidikan yang terdiri dari Urgensi kebijakan Pendidikan, konsep dasar Pendidikan serta kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan publik.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian ilmiah tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2010). Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang mengungkapkan tentang keadaan atau situasi subyek yang diteliti sesuai dengan fakta saat penelitian dilakukan yang berkaitan dengan kebijakan Pendidikan (Tanzeh, 2001).

Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka dengan menggunakan pendekatan content analysis. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *library research* (penelitian pustaka) (Sugiyono., 2013). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan induktif dengan mengacu pada topik yang ada.

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, cara menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi hanya dapat dipertontonkan penggunaannya.

HASIL DAN DISKUSI

Urgensi Kebijakan Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan berarti kepandaian, kemahiran, kebijkasanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan (Dowa Bili et al., 2023). Menurut Kamus Oxford, kebijakan berarti "rencana kegiatan" atau pernyataan-pernyataan tujuan ideal (Oxford University, 2010). Kebijakan (*policy*) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (*city*). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya(Setia Lengkana & Siti Nuraeni Sofa, 2017) .

Menurut Nichols, bahwa : "kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang dan rutin yang terpogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan". Pendapat lain dikemukakan oleh Klein dan Murphy, bahwa : "kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing sesuatu organisasi, kebijakan dengan demikian mencakup keseluruhan petunjuk organisasi" (Dowa Bili et al., 2023). Hough (1984) juga menegaskan sejumlah arti kebijakan. Kebijakan bisa menunjuk pada seperangkan tujuan, rencana atau usulan, program-program, keputusan-keputusan, menghadirkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang atau peraturan-peraturan (Iskandar et al., 2022).

Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tujuan, rencana, program-program yang dibuat untuk menjadi pedoman ketika melakukan kegiatan atau mengambil keputusan di mana kebijakan

tersebut memiliki sanksi jika tidak dilaksanakan. Dengan demikian dapat disimpulkan landasan kebijakan pendidikan merupakan konsep hukum yang mendasari ditetapkannya suatu aturan dalam bidang pendidikan agar tercipta keselarasan antara kebutuhan dengan situasi dan kondisi dalam proses Pendidikan.

Faktor yang menentukan perubahan, pengembangan, atau restrukturisasi organisasi adalah terlaksananya kebijakan organisasi sehingga dapat dirasakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar berfungsi dengan baik. Hakikat kebijakan ialah berupa keputusan yang substansinya adalah tujuan, prinsip dan aturan-aturan. Format kebijakan biasanya dicatat dan dituliskan sebagai pedoman oleh pimpinan, staf, dan personel organisasi, serta interaksinya dengan lingkungan eksternal (Janu Istanti, n.d.).

Kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (*policy making*) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan berhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran), dan *feedback* (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan (Janu Istanti, n.d.).

Berdasarkan penegasan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan dibuat untuk menjadi pedoman dalam bertindak, mengarahkan kegiatan dalam pendidikan atau organisasi atau sekolah dengan masyarakat dan pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kebijakan merupakan garis umum untuk bertindak bagi pengambilan keputusan pada semua jenjang pendidikan atau organisas. Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:

1. Memiliki tujuan Pendidikan
2. Memenuhi aspek legal-formal
3. Memiliki konsep operasional
4. Dibuat oleh yang berwenang
5. Dapat dievaluasi
6. Memiliki sistematika

Salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pendidikan untuk semua menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik ataupun mental, hambatan ekonomi dan sosial ataupun kendala geografis, dengan menyediakan layanan pendidikan untuk menjangkau mereka yang tidak terjangkau (Zubaedi, 2012).

Pendidikan nasional bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan program besar, yang menyajikan tantangan tersendiri. Hal ini karena jumlah penduduk yang luar biasa dan posisinya tersebar ke berbagai pulau. Ditambah lagi Indonesia merupakan masyarakat multi-etnis dan sangat pluralistik, dengan tingkat sosial-ekonomi yang beragam (Fazira et al., 2024). Hal ini menuntut adanya sistem pendidikan nasional yang kompleks, sehingga mampu memenuhi

kebutuhan seluruh rakyat. Sistem pendidikan semacam itu tidak mungkin dipenuhi tanpa adanya suatu perencanaan pendidikan nasional yang handal. Perencanaan itu juga bukan perencanaan biasa, tetapi suatu bentuk perencanaan yang mampu mengatasi perubahan kebutuhan dan tuntutan, yang bisa terjadi karena perubahan lingkungan global(Wahdani & Burhanuddin, 2020). Globalisasi yang menjangkau seluruh bagian bumi membuat Inonesia tidak bisa terisolasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi, membuat segala hal yang terjadi di dunia internasional berpengaruh juga berpengaruh ke Indonesia.

Dalam mengimplementasikan desentralisasi di bidang pendidikan, sebagai wujud dari implementasi kebijakan pemerintah maka diterapkanlah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan MBS, maka sekolah-sekolah yang selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak, sehingga mutu dapat ditingkatkan. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut merupakan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, sekaligus sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan. Tanggung jawab pengelolaan pendidikan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh sekolah dan masyarakat dalam rangka mendekatkan pengambilan keputusan ke tingkat yang paling dekat dengan peserta didik.

Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orangtua, kelenturan pengelolaan sekolah, peningkatan profesionalisme guru, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat (stake-holders), terutama yang mampu dan peduli terhadap masalah pendidikan. Implikasinya adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengelola pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya. Juga, melakukan perubahan kelembagaan untuk memenuhi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta memberdayakan sumber daya manusia, yang menekankan pada profesionalisme.

Konsep Dasar Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan (*educational policy*) merupakan penggabungan dari kata *educational* dan *policy.* Kebijakan adalah seperangkat aturannya, sedangkan pendidikan menunjukkan pada bidangnya. Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak terlalu berbeda dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan (Nurman, 2019). H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho mengatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan Langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu (Iskandar et al., 2022).

Kebijakan pendidikan ada dikarenakan munculnya permasalahan-permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan. Permasalahan ini terjadi dikarenakan terdapatnya kesenjangan antara penyelenggara pendidikan dengan tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah aktivitas dalam merumuskan langkah maupun tahapan dalam penyelenggaraan pendidikan

melalui penjabaran visi misi pendidikan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan pada waktu tertentu(Darmansyah et al., 2025).

Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa kebijakan pendidikan berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pendidikan (Riant, 2008). Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan (Bakry, 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berhubungan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis pelaksanaan pendidikan.

Komponen Kebijakan Pendidikan

Charles O. Jones (1979) menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu;

1) *Goal* (Tujuan). Tujuan diartikan sebagai hasil yang ingin didapatkan oleh individu maupun kelompok dalam rentang waktu yang ditetapkan. Tujuan dirancang sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas agar proses penerapanya terarah. Tujuan kebijakan pendidikan harus dibuat rasional agar mudah diterima oleh berbagai pihak.

2) *Plans* (Rencana). Setelah tujuan pendidikan dirancang maka selanjutnya adalah membuat perencanaan kerja yang lebih spesifik agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja dibuat bertujuan untuk proses manejemen dan penerapan kebijakan pedidikan agar proses pengeimplementasianya terarah dan jelas.

3) *Programme* (Program). Setelah perencanaan kerja dibuat maka selanjutnya adalah proses pengembangan program. Program merupakan aktivitas berupa proyek yang nyata berdasarkan tujuan yang telah didesain sebelumnya. Program merupakan upaya yang dilakukan agar tercapainya tujuan dengan cara melihat tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan untuk dapat mengembangkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan pertimbangan ketika proses pengambilan keputusan.

4) *Decision* (Keputusan). Keputusan merupakan sebagai bentuk tindakan dalam penentuan tujuan, pembuatan rencana program, pelaksanaan program, dan proses evaluasi program. Pengambilan keputusan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji coba terhadap alternatif-alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus bersifat rasionalitas agar hasil tersebut dapat diterima oleh berbagai pihak.

5) *Efects* (Dampak). Dampak merupakan pengaruh yang ditimbulkan setelah kebijakan di laksanakan. Dampak ini dapat berupa sengaja maupun ketidaksengajaan baik berupan dampak priimer maupun dampak sekunder. Dampak juga dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif.

Komponen-komponen ini lah yang dapat melahirkan sebuah kebijakan pendidikan. Tanpa adanya salah satu dari komponen tersebut maka tidak akan

berjalannya kebijakan pendidikan. Kelima komponen ini saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lainnya.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Dalam proses pembuatan kebijakan ada satu tahapan penting yang harus dilaksanakan yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dalam menerapkan kebijakan yang telah diesepakati dari beberbagai alternatif kebijakan yang telah di desain (Hendrawan et al., 2020). Jika dikaitkan dengan kebijakan pendidikan maka implementasi kebijakan pendidikan merupakan penerapan kebijakan pendidikan yang telah diputuskan bersama dari berbagai alternatif kebijakan pendidikan lainnya (Hefni, 2020).

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh individu maupun sekelompok pemangku kepentingan untuk menerapkan kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan (Yamin et al., 2024). Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan aktivitas dalam menerapkan kebijakan yang telah disepakati yang berguna untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam proses implementasi kebijakan akan terlihat kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapain tujuan pendidikan. Dari semua rangkaian perumusan kebijakan pendidikan, maka proses implementasi ini lah yang menjadi tahapan yang lebih rumit dan kompleks. Hal ini dikarenakan perlunya kerjasama yang kuat antar elemen yang ada baik dari pihak pusat maupun elemen daerah, proses implementasi kebijakan pendidikan terdiri umumnya menggunakan empat pendekatan yaitu:

1. Pendekatan struktural. Pada hakikatnya pendekatan struktural bersifat top down. Pendekatan ini memandang bahwa perancangan, pengimplementasian dan proses evaluasi kebijakan pendidikan dilakukan secara struktutral serta sesuai dengan tingkatan maupun tahapannya, (Yuliah, 2020). Sehingga jika diamati bahwa pendekatan ini lebih bersifat birokratis dan cendrung kaku.
2) Pendekatan prosedural dan manajerial. Pendekatan prosedural dan manjerial lebih mementingkan prosedur dan teknik yang tepat dalam mengembangkan kebijakan dibandingkan penantaan struktur pelaksana, (Setyawan, 2014). Sehingga pendekatan ini membutuhkan alat teknologi dalam proses pengimplementasian kebijakan.
3) Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku memandang bahwa pelaksana kebijakan adalah prilaku manusia, (Machali, 2015). Implementasi kebijakan pendidikan akan terlaksana dengan baik apabila manusia juga memiliki prilaku yang baik.
4) Pendekakatan politik. Pendekatan politik lebih memfokuskan faktor politik penguasa dalam mempermudah maupun memperhambat penerapan kebijakan pendidikan, (Hartono, 2016). Pendekatan ini cendrung mempertimbangkan kenyataan politik yang terjadi. Keempat pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan namun sehingga memerlukan kebijaksanaan dalam menggunakanya agar kebijakan pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah di tetapkan.

Keempat pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan namun sehingga memerlukan kebijaksanaan dalam menggunakanya agar kebijakan pendidikan dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah di tetapkan.

Analisis

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan bukanlah masalah yang mudah terutama dalam mencapai tujuan bersama. Cukup sulit untuk membuat sebuah kebijakan publik yang baik dan adil. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bantuk dan cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka yang dianggap klien. Masalah lainnya adalah kesulitan dalam memenuhi tuntutan berbagai kelompok yang dapat menyebabkan konflik yang mendorong berkembangnya pemikiran politik sebagai konflik.

suatu konsep kebijakan Pendidikan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan dalam hal ini pelaksana Pendidikan, Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Lebih sederhana lagi kinerja (*performance)* merupakan tingkat pencapaian hasil atau *the degree of accomplishment*.

Suatu kebijakan yang baik tidak akan bisa berjalan tanpa adanya konsep yang baik, konsep yang baik juga terasa sia-sia jika tanpa adanya sebuah kebijakan. Dalam dunia Pendidikan sangat diperlukan sebuah konsep kebijakan Pendidikan untuk mempermudah mencapai tujuan Pendidikan itu sendiri, sebuah kebijakan yang baik, adil, berpihak pada kebenaran, fokus pada tujuan serta tegas dalam pelaksanaan, seperti inilah kebijakan yang sangat diperlukan di negara ini.

terdapat empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi sebuah kebijakan, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), kecenderungan tingkah laku atau sikap (disposition atau attitude), serta struktur birokrasi (*bereucratic structure*) (Ika et al., 2019).

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang berkaitan dengan bidang pendidikan dalam proses penjabaran visi misi pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan melalui langkah strategis. Komponen kebijakan pendidikan terdiri dari lima yaitu *tujuan, rencana, program, keputusan, dan dampak*. Karakteristik kebijakan pendidikan yaitu memiliki tujuan pendidikan, memenuhi aspek legal-formal, memiliki konsep operasional, dibuat oleh yang berwenang, dapat dievaluasi dan memiliki sistematika.Pendekatan dalam pengimplementasian kebijakan pendidikan terdiri dari pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan manejerial, pendekatan prilaku dan pendekatan politik.

Konsep kebijakan pendidikan berkaitan dengan upaya pemberdayaan peserta didik. Oleh karena itu pendidikan merupakan ilmu praktis, maka kebijakan pendidikan merupakan proses pemanusiaan yang terjadi dalam lingkungan alam dan sosialnya sehingga konsep kebijakan pendidikan adalah penjabaran dari visi dan misi pendidikan dalam masyarakat tertentu. Sedangkan validasinya terletak pada seberapa besar sumbangsih kebijakan tersebut bagi proses pemerdekaan individu dan pengembangan pribadi yang kreatif dalam mentransformasikan

masyarakat serta kebudayaannya. Kebijakan yang baik akan dapat merumuskan secara eksplisit pernyataan resmi mengenai pilihan tindakan yang akan dilakukan, teori, proposisi dan model sebab-akibat yang mendasari kebijkan, serta hasil-hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Artinya, dalam sebuah lingkaran perumusan kebijakan, pilihan-pilihan tindakan yang resmi dibuat berdasarkan hipótesis dari proposisi-proposisi dari berbagai teori untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan.

REFERENSI

Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. . . *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, *1*(1), 1–11.

Anwar, M. E. (2017). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *03*(05), 1–10.

Darmansyah, T., Rafsanjani, A., Nisa, K., & Nabila Damanik, S. (2025a). Implementation of Education Policy to Support Vision and Mission at MIS Ummul Quraa Tembung. *Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies*, *3*(1), 66. https://doi.org/10.58355/qwt.v3i1.91

Darmansyah, T., Rafsanjani, A., Nisa, K., & Nabila Damanik, S. (2025b). Implementation of Education Policy to Support Vision and Mission at MIS Ummul Quraa Tembung. *Journal Of Education, Arabic And Islamic Studies*, *3*(1), 66. https://doi.org/10.58355/qwt.v3i1.91

Dewi, R. (2016). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI TINJAU DARI SEGI HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK. In *Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 7, Issue 2). Oktober.

Dowa Bili, K., Bagus Putu Arnyana, I., & Dantes, N. (2023). Kebijakan Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar Kata kunci. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *10*(10). http://Jiip.stkipyapisdompu.ac.id

Fazira, A., Budimansyah, D., & Mahpudz, A. (2024). Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Society 5.0: Menerapkan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, *13*(1), 809–824. https://jurnaldidaktika.org

Gunawan, H. (2022). *Pendidikan Karakter: Konsep dan Implementasi*. Alfabeta.

Hambali, M., & Yulianti, E. (2018). EKSTRAKURIKULER KEAGAMAAN TERHADAP PEMBENTUKAN KARAKTER RELIGIUS PESERTA DIDIK DI KOTA MAJAPAHIT. *Jurnal Pedagogik*, *05*(02). https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik

Hefni, W. (2020). Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. *Jurnal Bimas Islam*, *13*(1).

Hendrawan, B., Fahmi Nugraha, M., Nugraha, F., Tasikmalaya, K., Barat, J., PGPAUD Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, P., Tamansari Km, J., & Kota Tasikmalaya, T. (2020). *Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian dan Pendidikan dan Pembelajaran*. *5*(1), 684–691.

Ika, A., Sekolah, S., Agama, T., & Pati, I. (2019). PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS KOMUNITAS MASYARAKAT MELALUI PEREMPUAN FATAYAT NU DI ERA GLOBALISASI. *Jurnal Tarbawi*, *16*(2).

Iskandar, K., Kiai, I., & Faqih Gresik, A. (2022). Transformasi Model Kebijakan dan Perencanaan Strategis dalam Sistem Pendidikan. *Urwatul Wutqo, Jurnal Kependidikan Dan Keislaman*, *11*(2). https://doi.org/10.54437/juw

Janu Istanti, D. (n.d.). Dinamika Kebijakan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Pasca Reformasi. *JIPP : Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, *05*(02), 140–156.

Junaid, H. (2016). Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan (Kajian Fungsionalisasi secara makro dan mikro terhadap rumusan kebijakan pendidikan nasional). *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, *7*(2), 84–102.

Muslich, M. (2011). Pendidikan karakter: menjawab tantangan krisis multidimensional. In *Bumi Aksara*. Bumi Aksara.

Nurman, M. (2019). Evaluasi Manajemen Jurusan Dalam Meningkatkan Kemampuan Menulis Skripsi Berbahasa Arab Mahasiswa Jurusan PBA UIN Mataram. *El-Tsaqafah: Jurnal Jurusan PBA*, *18*(1). http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/eltsaqafah

Oxford University. (2010). *Oxford advanced learner's dictionary: international student's edition.* (8th ed.). Oxford University Press.

Rusdiana, A. (2015). *Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke Implementasi*. Pustaka Setia.

Setia Lengkana, A., & Siti Nuraeni Sofa, N. (2017). Kebijakan Pendidikan Jasmani dalam Pendidikan. *Jurnal Olahraga*, *3*(1). http://jurnalolahraga.stkippasundan.ac.id/index.php/jurnalolahraga

Sugiyono. (2010). *Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, 15th ed.* Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Tanzeh, A. (2001). *Metode Penelitian Pendidikan,* (2nd ed.). SIC.

Wahdani, F., & Burhanuddin, H. (2020). Pendidikan Keluarga di Era Merdeka Belajar. *Al-Aufa: Jurnal Pendidikan ….* https://ejournal.sunan-giri.ac.id/index.php/AL-AUFA/article/view/271

Yamin, S., Susanto, A. B., & Rudiansyah, F. (2024). Aktualisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama di SMP Qur'an Darul Fattah Bandar Lampung. *Islam Edu : Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, *2*(2).

Yuniarti, I., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN MADRASAH. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, *9*(1).

Zubaedi. (2012). *Desain Pendidikan Karakter*. Kencana Predana Media Grup.